

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan stabilitas ekonomi suatu negara. Ketika inflasi tidak terkendali, daya beli masyarakat menurun, biaya produksi meningkat, dan iklim investasi menjadi tidak pasti. Kondisi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan efektivitas kebijakan fiskal suatu negara. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga keseimbangan dan ketahanan ekonomi nasional [1].

Dalam konteks Indonesia, inflasi memiliki implikasi luas terhadap kebijakan pembangunan daerah. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok, menurunkan daya beli masyarakat, serta menimbulkan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga berupaya memperkuat sistem pemantauan dan pengendalian inflasi secara terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pengembangan Aplikasi Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah (WasInflasi) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) sebagai sarana pemantauan dan pelaporan kinerja pengendalian inflasi di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan data WasInflasi hingga Agustus 2024, inflasi nasional tercatat sebesar 1,89% (yoy), dengan rincian inflasi inti sebesar 2,12%, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 0,45%, dan inflasi barang bergejolak sebesar 0,32%. Meskipun secara nasional angka tersebut tergolong terkendali, masih terdapat

risiko di tingkat daerah, terutama pada komoditas pangan di wilayah timur Indonesia yang berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap stabilitas ekonomi regional. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem monitoring yang andal dan konsisten di lingkungan Itjen Kemendagri [1].

Selain itu, perkembangan kebijakan nasional dalam transformasi digital pemerintahan melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional menegaskan pentingnya integrasi sistem informasi antarinstansi pemerintah. Dalam konteks ini, penerapan aplikasi WasInflasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis data. Oleh karena itu, tingkat penerimaan pegawai terhadap sistem menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan implementasi SPBE, khususnya di sektor pengawasan dan pengendalian kebijakan ekonomi daerah.

Namun demikian, keberhasilan implementasi aplikasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan kualitas sistem, tetapi juga oleh penerimaan dan perilaku pengguna. Hambatan adopsi sering kali muncul akibat persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kemanfaatan sistem, tingkat kepercayaan terhadap keamanan data, serta kepuasan terhadap pengalaman penggunaan. Rendahnya penerimaan pengguna dapat menyebabkan aplikasi tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga tujuan pengendalian dan pelaporan inflasi menjadi tidak tercapai.

Lebih lanjut, Itjen Kemendagri sebagai unit pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pengendalian inflasi. Dengan adanya aplikasi WasInflasi,

pengawasan terhadap capaian kinerja daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur dan akuntabel. Namun, efektivitas aplikasi ini sangat bergantung pada sejauh mana pengguna memahami manfaatnya serta memiliki kepercayaan terhadap sistem. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan strategi peningkatan adopsi dan optimalisasi penggunaan sistem berbasis digital di lingkungan Kemendagri.

Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Importance Performance Analysis* (IPA). Model *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi, yaitu *Perceived Ease of Use* (PEOU), *Perceived Usefulness* (PU), *Trust*, dan *User Satisfaction* terhadap *Behavioral Intention* (BI) [2][3]. Sedangkan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) digunakan untuk memetakan sejauh mana tingkat kepentingan (*importance*) dan kinerja (*performance*) dari setiap indikator aplikasi WasInflasi dirasakan oleh pengguna, sehingga dapat diketahui aspek mana yang menjadi prioritas perbaikan atau penguatan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga mengonfirmasi relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam konteks *e-government* di Indonesia, seperti pada sistem E-Kinerja, layanan edukasi pajak digital, dan penggunaan QRIS, yang menegaskan peran penting *Perceived Ease of Use* (PEOU) dan *Perceived Usefulness* (PU) terhadap *Behavioral Intention* (BI), serta dukungan faktor non-teknis seperti keamanan dan pengaruh sosial [4]. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kualitas sistem, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna dan penerimaan teknologi [5]. Aspek desain antarmuka dan pengalaman pengguna juga berperan penting

dalam membentuk persepsi positif terhadap sistem, sehingga perlu dilakukan pengujian kegunaan (*usability testing*) untuk memastikan kenyamanan interaksi pengguna [6].

Dari sisi akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada sektor publik, khususnya dalam konteks aplikasi pengawasan berbasis data di pemerintahan. Dengan menambahkan variabel *Trust* dan *User Satisfaction*, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi di sektor birokrasi. Selain memberikan kontribusi teoretis, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis dalam pengembangan kebijakan internal, peningkatan literasi digital pegawai, serta perbaikan berkelanjutan terhadap sistem aplikasi WasInflasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna [7].

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Belum diketahui sejauh mana tingkat penerimaan pegawai terhadap aplikasi WasInflasi di lingkungan Itjen Kemendagri.
2. Belum diketahui faktor-faktor utama yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi WasInflasi berdasarkan model *Technology Acceptance Model* (TAM).

3. Belum dilakukan analisis tingkat kepentingan dan kinerja setiap indikator menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk menentukan prioritas peningkatan sistem.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penerimaan pegawai terhadap aplikasi Wasinflasi di lingkungan Itjen Kemendagri?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor dalam model *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu *Perceived Ease of Use* (PEOU), *Perceived Usefulness* (PU), *Trust*, dan *User Satisfaction* terhadap *Behavioral Intention* (BI) pengguna aplikasi WasInflasi?
3. Bagaimana hasil analisis tingkat kepentingan dan kinerja setiap indikator aplikasi WasInflasi berdasarkan metode *Importance Performance Analysis* (IPA)?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat penerimaan aplikasi WasInflasi berdasarkan model *Technology Acceptance Model* (TAM).
2. Mengidentifikasi pengaruh *Perceived Ease of Use* (PEOU), *Perceived Usefulness* (PU), *Trust*, dan *User Satisfaction* terhadap *Behavioral Intention* (BI) pengguna aplikasi.

3. Mengevaluasi tingkat kepentingan dan kinerja setiap indikator menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk mengetahui atribut yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) yang berlokasi di Jakarta. Itjen Kemendagri merupakan unit pengawasan internal yang memiliki fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan di daerah, termasuk kebijakan pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, instansi ini menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti tingkat penerimaan pegawai terhadap sistem informasi yang mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi tersebut.

Fokus penelitian diarahkan pada pegawai Itjen Kemendagri yang secara aktif menggunakan Aplikasi Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah (WasInflasi) dalam kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian inflasi. Aplikasi ini dipilih karena merupakan inovasi digital strategis dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kemendagri, khususnya dalam aspek pengawasan dan pelaporan kinerja daerah.

Secara konseptual, penelitian ini dibatasi pada analisis penerimaan pengguna (*user acceptance*) terhadap aplikasi WasInflasi dengan menggunakan kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperluas dengan dua variabel tambahan, yaitu *Trust* dan *User Satisfaction*. Model ini digunakan untuk mengukur sejauh mana *Perceived Ease of Use* (PEOU), *Perceived Usefulness* (PU), *Trust*,

dan *User Satisfaction* berpengaruh terhadap *Behavioral Intention* (BI) pegawai dalam menggunakan aplikasi WasInflasi.

Selain itu, penelitian ini menerapkan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) untuk mengevaluasi tingkat kepentingan (*importance*) dan kinerja (*performance*) dari setiap indikator variabel penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang menjadi prioritas perbaikan dan aspek-aspek yang perlu dipertahankan berdasarkan persepsi responden terhadap aplikasi.

Penelitian ini tidak mencakup aspek teknis sistem, seperti arsitektur jaringan, desain basis data, maupun pengujian keamanan data, karena fokus utama diarahkan pada perilaku dan persepsi pengguna terhadap aplikasi. Penelitian ini juga tidak menilai faktor eksternal di luar pengalaman penggunaan, seperti kebijakan kelembagaan, kondisi ekonomi daerah, atau pengaruh sosial antarinstansi.

Ruang lingkup waktu penelitian dibatasi pada periode 1 November 2025 hingga 30 November 2025, sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan. Dalam periode tersebut, kegiatan penelitian meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan data melalui kuesioner, serta analisis hasil menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM) dan metode *Importance Performance Analysis* (IPA).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai tingkat penerimaan pegawai terhadap aplikasi WasInflasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta persepsi pengguna terhadap kinerja dan prioritas pengembangan sistem di lingkungan Itjen Kemendagri.